

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penegakan Pelanggaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dijual di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn dilakukan sebagai bentuk dan upaya pemerintah dalam menegakan hukum mengenai penyaluran pupuk subsidi dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terdakwa melakukan pembelian Pupuk Subsidi tanpa memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan bukti temuan sebanyak 210 sak kemasan 50 kg di toko UD Putra di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban milik terdakwa yang dibeli dari Kabupaten Sampang Madura. Pupuk tersebut kemudian dijual kembali diatas HET untuk memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp. 20.000,-. Penyaluran pupuk subsidi dan pemberian harga pupuk diatas HET merupakan pelanggaran atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 23, Pasal 33 dan Pasal 34 yang mengatur mengenai penyaluran dan memperjualbelikan pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dijual oleh Kios dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Praktik yang dilakukan Terdakwa melalui UD. Putra

Tani yang seharusnya merupakan lini IV menciptakan ketimpangan akses bagi petani. Distribusi resmi yang seharusnya berbasis sistem e-RDKK dan Kartu Tani berfungsi untuk memastikan keadilan bagi petani namun tidak dapat tercapai dikarenakan tujuan subsidi tersebut tidak dapat dirasakan oleh petani akibat terdakwa menjual pupuk subsidi diatas HET dan tidak tepatnya alokasi wilayah sasaran penerima pupuk akibat praktik jual beli pupuk secara illegal yang dilakukan terdakwa dari daerah Madura ke Tuban. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengabaikan konsekuensi hukum dari Undang-Undang Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian..

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas terdapat saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum harus mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku terkait dengan pendistribusian dan penetapan harga pupuk subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perlunya memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat maupun kelompok tani mengenai implikasi hukum dan perbaikan penyaluran serta pengawasan pupuk bersubsidi melalui sosialisasi dan perbaikan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Eka Sastra (2023) Berburu Rente : Kajian Kritis Subsidi Pupuk Di Indonesia. Expose Publika.
- Handayani, T. A. (2025). Tindak Pidana Ekonomi. REPOSITORY CV INDONESIA IMAJI.
- Hosnah et al. (2021). Karakteristik Ilmu Hukum Dan *Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Pertama*. Depok: Rajawali.
- Kurniawan, R., & Wibowo, T. (2017). *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mataram University Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*. Mataram:
- Qumadi, Magfur. (2019). Subsidi Pupuk dalam Realitas Petani Besuara Fakta Berbicara. Surabaya. CV Pustaka MediaGuru.
- Rahmanto (2020) Kumpulan Peraturan Pupuk. Direktorat Pupuk dan Pestisida.

B. Jurnal

- Adiraputra, P., & Supyandi, D. (2021). Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Effectiveness Of Fertilizer Subsidies In Sukaasih Village Sukatani District Bekasi Regency. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Januari, 7(1), 594-606.
- Ak, A. T., Ahmadi, N., & Senor, I. W. (2025). ANALISIS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI DESA MUKTI JAYA KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN. *Jurnal Imiah Management Agribisnis (Jimanggis)*, 6(1), 63-74.
- Cahyani, P. D., Widiyanto, M. K., & Ismail, H. (2025). Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Nganjuk Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Public Sphere Review*, 63-76.

- Cahyani, P. D., Widiyanto, M. K., & Ismail, H. (2025). Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Nganjuk Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Public Sphere Review*, 63-76.
- Daffa'Alhidayah, P., & Hafid, S. F. (2024). Diskriminasi Reformasi Hukum Pertanian: Perjuangan Petani untuk Mendapatkan Akses Pupuk Subsidi. *RESPONSIVE LAW JOURNAL*, 1(2), 21-28.
- Daffa'Alhidayah, P., & Hafid, S. F. (2024). Diskriminasi Reformasi Hukum Pertanian: Perjuangan Petani untuk Mendapatkan Akses Pupuk Subsidi. *RESPONSIVE LAW JOURNAL*, 1(2), 21-28.
- Famela, O., Prayudhi, L. A., Zamrodah, Y., & Widiyatmanta, J. (2023). Strategi penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan wonotirto. *RADIKULA: Jurnal Ilmu Pertanian*, 2(1), 25-30.
- Gazali, H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Terkait Dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Gazali, H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Terkait Dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Harianto, S., & AK, A. T. (2023). ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MUARA ENIM. *Jurnal Imiah Management Agribisnis (Jimanggis)*, 4(1), 11-18.
- Heliaantoro, H., & Juwana, H. (2018). *Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, hal 4
- Heliaantoro, H., & Juwana, H. (2018). *Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 37-65.

- Herlambang, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. *Binamulia Hukum*, 12(1), 47-56.
- Indonesia, K. P. R. (2022). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. *Kementan RI. Jakarta*.
- Indriasari, D. P., & Sani, A. (2019). Pengendalian Manajemen Pupuk Subsidi. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 1(1).
- Junianda, N. (2024). *Peran Ketersediaan Pupuk Subsidi Dalam Peningkatan Hasil Panen Padi Desa Lili Riawang Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Karundeng, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 1-6.
- Kasiyanto, A. (2017). Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal de Facto*,
- Kholis, I., & Setiaji, K. (2020). *Analisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi*. *Economic Education Analysis Journal*,
- Kurniawan, H. M., & Widarti, S. (2021). Sosialisasi E-RDKK Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Di WKPP Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen*, 1(1), 30-39.
- Lubis, A. R., Nabilla, T. P., Rayhan, M., Mutia, N., Aradimas, M. I., & Sativa, A. (2024). Dampak Kelangkaan Pupuk Subsidi Terhadap Produktivitas Pertanian Di Desa Susuk Kecamatan Tiganderket. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 4966-4971.
- Muchdhor, M. A. (2023). Analisis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Pencabutan Subsidi Pupuk Untuk Petani Tambak

Perspektif Asas Keadilan & Masalah Al Mursalah. *Journal of Engineering Research*.

- Nasir, C. (2025). Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Kerangka Hukum, Permasalahan Implementasi, dan Strategi Reformasi. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 60-78.
- Pohan, S. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 756-767.
- Pratama, D. B. (2020). Pendistribusian pupuk bersubsidi yang berimplikasi tindak pidana ekonomi. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 197-21
- Priandanata, W., Andreas, D., & Jamal, A. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengambilan Keputusan Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 305-322.
- Rachman, B. (2009). Kebijakan subsidi pupuk: tinjauan terhadap aspek teknis, manajemen, dan regulasi. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(2), 131-146.
- Ragimun, R., Makmun, M., & Setiawan, S. (2020). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 10(1).
- Rahmadani, A. A. (2025). *Evaluasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem E-RDKK oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Mamo, Y. O., Sofilda, E., & Huda, N. (2024). PERAN KOMISI IV DPR RI DALAM MENGAWASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI. *Media Bina Ilmiah*, 18(11), 2803-2820.
- Ramadhani, T. P. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). *JURNAL BEVINDING*, 1(02), 62-67.
- Ramdania, D. (2021). Eksistensi Undang-Undang Drt Nomor 7/1955 Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes). *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 1-14.

- Ridwansyah, R. (2024). Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(01).
- Putri, I., & Kinanti, L. P. (2024, August). Mengurai Konsep Kemanfaatan Bersama: Pemahaman Teori Utilitarianisme Dalam Etika Bisnis. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 42, pp. 183-188).
- Budiono, A. (2019). Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 102-116.
- Siallagan, J. O., Chalil, D., & Jufri, M. (2014). Analisis efisiensi penggunaan pupuk bersubsidi pada tanaman padi sawah. *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, 2(4), 1-10.
- Situmorang, E. S. (2020). ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH TANPA IZIN.
- Situmorang, E. S. (2020). ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH TANPA IZIN.
- Sucahyo, I., Mubaroq, H., & Febriyanto, M. D. (2022). Implementasi Program Kartu Tani Terhadap Ketersediaan Pupuk 2021 Di Desa Tegalsojo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(4), 1055-1062.
- Sugiono, S., & Gufroniah, S. F. (2023). Pendistribusian pupuk bersubsidi dengan acuan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) perspektif etika bisnis. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 371-385.
- Suhartin Akadji, Nur Insani, dan Rusmulyadi Rusmulyadi. “Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi kepada Masyarakat.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 123–30. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1691>.

- Tyas, W., Rohmah, M., & Lestari, I. (2024). Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Petani Kecamatan Buay Pemuka Peliung Ditinjau Dari Segi Ketepatan Tempat, Jumlah, Harga, Jenis, Waktu Dan Mutu. *SIMBIOSIS: Jurnal Sains Pertanian*
- Umam, K., & Inayah, S. H. (2018). *Tinjauan Yuridis Tentang Pelanggaran Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Karanganyar Dan Penyelesaiannya Berdasarkan Peraturan menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Yuliani, F. (2015). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

C. Website

- Pupuk Indonesia. (2025). Penerapan HET 2025 untuk Urea, NPK, ZA dan Pupuk Organik. <https://www.pupuk-indonesia.com/media-info/article-detail/48/penerapan-het-2025-untuk-urea-npk-za-dan-pupuk-organik>. Diakses 03 Januari 2025

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 mengenai Penetapan Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
- Peraturan menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

E. Sumber Lain

Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn